

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, SUMBER DAYA
MANUSIA BIDANG AKUNTANSI, DAN PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP
KETERANDALAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD
(Studi Persepsian SKPD Se Kabupaten Agam)**

Oleh :

Seprizal

Pembimbing : Ria Nelly Sari dan Lila Anggraini

Faculty of Economics, Riau University, Pekanbaru, Indonesia

e-mail : sepririjal@yahoo.com

*The Effect of Internal Control System, human resources on accounting division,
information technology utilization to reliability of financial statements
(Perception Study at SKPD's of Agam Regency)*

ABSTRACT

This research aims to examine the effect of internal control system, human resources on accounting division, information technology utilization to reliability of financial statements. This research was opinion research, population of this research was SKPD's accounting staff. Sampling method used was purposive sampling method. Statistical method to test the hypothesis was multiply regression using software SPSS 20. The result of this research showed internal control system and human resources on accounting division effects the reliability of financial statements but the information technology utilization was not effect the reliability of financial statements. The magnitude (R^2) of internal control system, human resources on accounting division, and information technology to reliability of financial statements was 46,4 % and the remaining 53,6% effected by other variable.

keywords : internal control, human resources, information technology, and financial statements

PENDAHULUAN

Dengan keluarnya Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, yang berisi tentang diharapkan setiap pemerintah daerah dapat mengelola keuangannya secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaporan keuangan bertujuan keuangan bertujuan untuk

memberikan keterandalan informasi terhadap pemakai. Informasi tersebut dianggap bernilai jika dapat dipahami dan digunakan. Unsur-unsur pembentuk laporan yang bernilai menurut Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP No. 24 Tahun 2005) terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami. Dengan adanya Undang-Undang dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, setiap daerah dipacu untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahannya dapat ditopang dengan dua pilar utama yaitu transparan dan akuntabel untuk mencapai laporan keuangan yang andal.

Keterandalan penyajian laporan keuangan diperlukan agar laporan keuangan bermanfaat bagi pengguna. Untuk itu asset Pemerintah harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan. Keterandalan laporan keuangan diartikan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Pengelolaan aset tetap daerah merupakan upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola asset. Pengelolaan dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Disamping itu, opini atas LKPD menggambarkan bagaimana pengelolaan keuangan di daerah tersebut. Pada tahun 2014 opini BPK untuk LKPD Kab. Agam tahun 2013 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang masih tetap sama seperti LKPD tahun 2010, 2011 dan 2012. Ini berarti bahwa belum adanya peningkatan terhadap pengelolaan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Agam dari tahun ke tahun.

Berdasarkan laporan dari BPK tersebut maka laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Agam kurang dapat diandalkan karena adanya kesalahan pada

penyajian laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. Salah satu alasan BPK mengeluarkan opini tersebut adalah adanya kelemahan yang terdapat pada sistem pengendalian internal.

Dalam laporan hasil pemeriksaan oleh BPK tahun 2013 bahwa SPI Pemerintah Kab. Agam banyak sekali kelemahan dalam pelaporan keuangan antara lain proses penyusunan anggaran pada tahun 2013 pada Pemerintah Kabupaten Agam tidak sesuai dengan ketentuan. Selain itu SPI pada kas keuangan daerah Kabupaten Agam tidak memadai, ditambah lagi penyajian nilai investasi *non permanent* dana bergulir pada neraca per 31 desember 2013 tidak didukung dengan data yang memadai pada bagian neraca Pemerintah Kabupaten Agam per 31 desember 2013 yaitunya pada nilai asset tetap dan asset lainnya tidak dapat diyakini kewajarannya dan ada lagi kelemahan dari SPI ini dapat mengakibatkan opini BPK itu selain dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang memungkinkan opini itu dengan asumsi negatif seperti yang didapat pada tahun 2010 sampai 2013 kemaren yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu diterapkan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Pusat dan Daerah berpedoman pada PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Masih banyaknya opini Tidak Memberikan Pendapat dan Tidak

Wajar yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam, menunjukan belum optimalnya efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah.

Dalam menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkompeten, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta mempunyai pengalaman dibidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber daya yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik.

Pada pemerintah Kabupaten Agam, sumber daya manusia dalam pembuatan laporan keuangan daerah kurang dapat diandalkan karena terkait dengan laporan BPK tahun 2010 sampai 2013 Kabupaten Agam mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini dikarenakan dari seluruh badan keuangan SKPD di Kabupaten Agam tidak semuanya berlatar belakang akuntansi. Pada laporan BPK tersebut kesalahan terhadap kepatuhan perundang-undangan disebutkan bahwa adanya pengelolaan investasi permanen yang tidak memadai.

Selanjutnya pada pemberian hibah dan belanja bantuan sosial tidak sesuai ketentuan. Ada enam pekerjaan konstruksi kontrak tahun pada dinas pekerjaan umum tidak selesai hingga akhir tahun anggaran 2013 sehingga harus putus kontrak dan diperhitungkan denda keterlambatan serta dicairkan jaminan pelaksanaannya. Kesalahan

itu dikarenakan pengelolaan keuangan SKPD Kabupaten Agam tidak dilakukan oleh sumber daya yang kurang berkompeten dibidangnya. Untuk lanjutanya diharapkan bahwa sumber daya manusia dapat diandalkan dan dioptimalkan dalam SKPD Kabupaten Agam.

Selain sumber daya manusia, hal yang juga mempengaruhi keterandalan laporan keuangan tersebut adalah teknologi informasi yang digunakan. Rahadi (2007) menyatakan bahwa teknologi informasi mempunyai mamfaat dan kemudahan dalam menghemat waktu dan tenaga kerja yang dibutuhkan. Kewajiban dalam menyampaikan informasi dengan teknologi informasi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang teknologi informasi keuangan daerah.

Penelitian Yuliani (2010) pada pemerintahan kota Banda Aceh bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit berpengaruh signifikan positif baik secara parsial maupun simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fikri (2011), yang meneliti mengenai penerapan sistem informasi keuangan daerah pada instansi pemerintah Kota Padang, penelitian tersebut menyatakan bahwa sistem informasi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas keandalan laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian ini, maka penulis merumuskan berbagai permasalahan "Apakah sistem pengendalian

internal berpengaruh terhadap keterandalan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kab. Agam, apakah sumber daya manusia bidang akuntansi berpengaruh terhadap keterandalan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kab. Agam, dan apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kab. Agam.

Tujuan dari penelitian ini adalah menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal, sumber daya manusia bidang akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kab. Agam.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Keterandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi dalam laporan keuangan harus andal, yakni bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Dalam penyusunan laporan keuangan pada pemerintah daerah harus dengan standar-standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah yang berwenang. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas.

Dalam peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006, tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, menyatakan laporan keuangan adalah bentuk dari tanggung jawab pengelolaan keuangan Negara dan daerah selama satu periode. Standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan.

Sistem Pengendalian Internal

Adapun pengertian sistem pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut: "Sistem Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan Pemerintah".

Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi

Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (*outcomes*).

Teknologi Informasi

Teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal dari komputer (*mainframe*, *mini*, *micro*), perangkat lunak (*software*), database, jaringan (internet dan intranet), *e-commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi informasi (Wilkinson *et al*, 2000). Hamzah (2009) menyatakan beberapa indikator dalam teknologi informasi dapat dilihat dengan adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan.

Berdasarkan peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008, sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk meyakinkan *stakeholders* maupun publik tentang keterandalan laporan keuangan yang dibuat pemerintah maka dibutuhkan sistem pengendalian internal yang optimal.

Pengendalian intern diharapkan mampu mencegah atau mendeteksi terjadinya kesalahan dalam proses akuntansi serta dapat

memberikan perlindungan bagi data organisasi dari adanya ancaman penyelewengan atau sabotase sistem. Pengendalian intern disusun agar pelaporan keuangan dapat memenuhi asas ketertiban yang merupakan cerminan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Perwujudan dari asas ketertiban tersebut adalah dengan penyampaian pelaporan keuangan secara tepat waktu (Mirnayanti, 2013). Pada penelitian Ruri Windiyastuti (2013) sistem pengendalian internal juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis dapat ditarik hipotesis :

H1: Ada pengaruh sistem pengendalian intern terhadap keterandalan laporan keuangan.

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan

Kualitas sumber daya manusia yang diukur berdasarkan jenjang pendidikan terakhir, pengalaman kerja dan pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti mampu mempengaruhi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin berkualitas sumber daya manusia dan mampu menjalankan fungsi dan peranannya dalam proses penyusunan laporan keuangan akan semakin andal pula laporan keuangan pemerintah daerah. Penyimpangan dan kebocoran yang masih ditemukan di dalam laporan keuangan menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yaitu keterandalan.

Penyebab ketidakandalan

laporan keuangan tersebut merupakan masalah yang berhubungan dengan pengendalian internal akuntansi, dan kurangnya pelatihan yang memadai dan tingkat pendidikan yang rendah dan tidak berkompeten dibidangnya, Hevesi (2005). Ketidakandalan penyajian laporan keuangan berarti bahwa laporan keuangan belum/tidak memenuhi nilai informasi yang disyaratkan. Ruri Windiyastuti (2013) kompetensi sumber daya manusia bidang akuntansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil itu juga diikuti oleh peneliti Made Ayu Darmayanti, dkk (2014) Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai laporan keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut terdapat hubungan positif antara sumber daya manusia terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah sehingga penulis mengajukan hipotesis:

H2: Ada pengaruh kualitas sumber daya manusia bidang akuntansi terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan

Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemamfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak dalam meakses laporan keuangan dengan akurat dan mudah, selain itu pemamfaatan sumber daya teknologi informasi kecepatan dalam pemprosesan informasi. Sistem akuntansi di Pemerintah Daerah sudah pasti

memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Dalam penelitian sebelumnya yaitu penelitian I Gede Agus Yudianta dan Ni Made Adi Erawati (2012) pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, dan terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan :

H3: Ada pengaruh Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Responden dalam penelitian ini adalah bagian dan staf akuntansi pada setiap SKPD yang ada di Kabupaten Agam. Jumlah SKPD yang di Kabupaten Agam ada 28 SKPD. Setiap SKPD akan diambil 3 responden dengan kriteria kasubag keuangan, bendahara dan staff keuangan. Sehingga sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 84 responden.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang dipeoleh secara langsung dari sumber asli, tidak melalui perantara.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, yang akan diberikan kepada responden yaitu pegawai

yang bekerja pada SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Agam.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Dependen

Indikator keandalan laporan keuangan seperti yang dinyatakan PP No. 24 Tahun 2005 yaitu (1) penyajian jujur, (2) Dapat diferifikasi, (3) Netralitas, variabel ini diukur dengan menggunakan skala likers 5 poin.

Variabel Independen

a. Sistem Pengendalian Internal

Variabel sistem pengendalian internal ini diukur dengan instrument yang dibuat oleh Xu, *et al.* (2003) yang mengacu pada PP No. 8 tahun 2006. Terdapat tujuh indikator, yaitu: (1) Integritas data, (2) Ketepatan input dan posting data, (3) Prosedur otorisasi dokumen transaksi, (4) Tersimpannya dokumen sumber data, (5) Pembagian tanggungjawab, (6) Penentuan kebijakan dan standar akuntansi. (7) Implementasi kebijakan dan standar dengan menggunakan skala likers 5 poin.

b. Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi

Xu, *et al.* (2003) mengatakan bahwa interaksi antara sumber daya manusia dan sistem adalah isu penting dalam implementasi sistem yang akan mempengaruhi kualitas informasi akuntansi. Variabel kualitas sumber daya manusia bidang akuntansi diukur dengan instrumen yang dibuat oleh Xu, *et al.* (2003). Terdapat empat indikator, yaitu: (1) Pemahaman terhadap peraturan dan standar, (2) Interaksi dengan sistem, (3) Kontrol terhadap SDM, (4) Pendidikan dan training, dengan menggunakan skala likers 5 poin.

c. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi Informasi diukur dengan indikator yang mengacu pada Wilkinson *et al* (2000) seperti (1) Perangkat, (2) Pengelolaan Data Keuangan, (3) Perawatan

Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah suatu kondisi dimana terjadi hubungan yang sempurna/kuat antar variabel-variabel independen. Uji multikolinearitas terjadi karena variabel independen lebih dari satu (*multivariate*) dan dikhawatirkan ada hubungan kuat diantaranya. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan *variance inflation factor (VIF)* dan *tolerance*. Multikolinearitas terjadi jika VIF lebih besar dari 10 dan nilai *tolerance* kurang dari 0.1.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya.

Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi antara anggota-anggota serangkaian observasi yang tersusun dalam rangkaian waktu atau yang tersusun dalam rangkaian ruang. konsekwensi dari adanya autokorelasi dalam suatu model regresi adalah varians sampel tidak menggambarkan varians populasinya. Untuk menguji ada

tidak autokorelasi, diukur dengan menggunakan statistik *Durbin Watson* (Ghozali, 2007).

Metode Analisis Data

Analisis Regresi Berganda

Untuk melihat pengaruh sistim pengendalian internal, sumber daya manusia, dan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Agam digunakan alat analisis regresi linear berganda. Bentuk umum dari perumusan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Koefesien Determinasi (R²)

Koefesien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen. Nilai koefesien determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2013:97)

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Untuk melakukan pengujian hipotesis secara parsial digunakan uji statistik t. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:98). Untuk dapat mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen, maka dibandingkan antara nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} serta membandingkan nilai signifikan t dengan *level of significant* (α). Nilai *level of significant* yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5%. Apabila sig t lebih kecil dari 0,05 maka H_0 diterima. Demikian pula sebaliknya jika sig t lebih kecil

dari 0,05 maka H_0 ditolak. Bila h_0 ditolak, ini berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Gambaran mengenai variabel-variabel penelitian yaitu sistem pengendalian internal, kualitas sumber daya manusia bidang akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan keterandalan laporan keuangan disajikan dalam tabel *descriptive statistics* yang menunjukkan angka minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi yang dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 1
Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation
Kandalan Laporan Keuangan Sistem Pengendalian Internal	50	30.0200	3.31656
Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi	50	45.6200	5.13845
Pemanfaatan Teknologi I	50	40.6600	4.83444
Valid N (listwise)	50	38.3200	5.86042

Sumber : Pengolahan Data SPSS, 2015

Hasil Uji Validitas Data

Uji validitas data digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner yang telah diedarkan. Di mana keseluruhan variabel penelitian terdiri dari 38 pernyataan yang harus dijawab oleh responden. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung

dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = $n - 2$ dengan alpha 0,05, n adalah jumlah sampel (Ghozali, 2013:53). Dalam penelitian ini $df = n-2$ ($50-2$) = 48, sehingga didapat r tabel untuk df (48) = 0,2787

Hasil Uji Reliabilitas Data

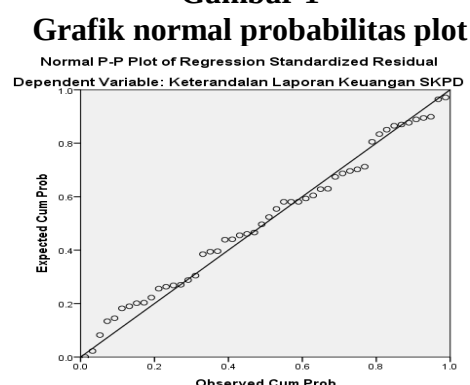
Dari hasil penelitian diperoleh nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,60. Dengan demikian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.

Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas di atas terlihat bahwa seluruh instrumen pernyataan yang digunakan untuk mengukur keseluruhan variabel yang diteliti dalam penelitian ini dinyatakan valid dan reliabel, sehingga data yang dihasilkan dari instrumen pernyataan dalam penelitian ini berkualitas dan layak untuk dianalisis lebih lanjut.

Hasil Uji Normalitas

Hasil grafik histogram dan grafik normal plot dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Gambar 1



Sumber : Pengolahan Data SPSS,2015

Dengan melihat grafik normal plot, kita dapat melihat bahwa titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis

diagonal.sehingga dapat dikatakan bahwa model pola distribusinya normal. Dengan melihat kedua grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini dapat digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Multikolinieritas Data

Suatu variabel dikatakan terbebas dari penyimpangan multikolinieritas, apabila nilai tolerance diantara 0.1-1.0, dan nilai VIF diantara 1.0-10. Hasil uji multikolinieritas dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel berikut ini:

Tabel 2

Hasil Uji Multikolinieritas Data

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Sistem Pengendalian Intern	0,487	2,055
Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi	0,567	1,764
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,679	1,472

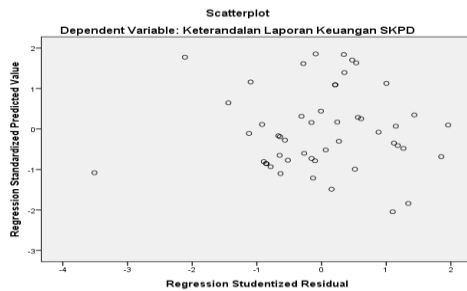
Sumber : Pengolahan Data SPSS,2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa keseluruhan nilai tolerance yang dihasilkan dalam penelitian ini berada diantara 0.1-1.0, dan nilai VIF diantara 1.0-10. Dengan demikian dapat dijustifikasi bahwa keseluruhan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian terbebas dari asumsi multikolinieritas.

Hasil Uji Heterokedastisitas Data

Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas dilakukan dengan melihat grafik Plot (*Scatterplot*) antara nilai prediksi variabel terikat (*ZPRED*) dengan residual (*SRESID*).

Gambar 2
Grafik diagram scatterplot



Sumber : Pengolahan Data SPSS,2015

Dari gambar grafik *Scatterplot* di atas, terlihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar pada sumbu Y. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Di dalam penelitian ini, autokorelasi dideteksi dengan nilai *Durbin-Watson*. Batas tidak terjadinya autokorelasi adalah angka *Durbin-Watson* berada antara -2 sampai dengan +2.

Tabel 3
Hasil Uji Durbin Watson

Durbin-Watson	Keterangan
1.924	Tidak terdapat Autokorelasi

Sumber: Pengolahan Data SPSS,2015

Berdasarkan hasil diatas diketahui nilai d_{hitung} (*Durbin Watson*) terletak antara -2 dan 2 = -2 < 1.924 < 2. Dapat disimpulkan, tidak terdapat autokorelasi dalam model penelitian.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda (*Multiple Regression Analysis*). Dari hasil penelitian didapat persamaan

regresi linear bergandanya adalah sebagai berikut:

$$Y = 9,348 + 0.230X_1 + 0.310X_2 - 0,063X_3 + e$$

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan variabel-variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berikut hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini :

Tabel 4
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.681 ^a	.464	.429	2.505

Sumber : Pengolahan Data SPSS,2015

Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai Adjusted R Square sebesar 0,464. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 46,4 %. Sedangkan sisanya 53,6 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

Hasil Uji Statistik t (Hipotesis) dan Pembahasan

Uji t bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Untuk dapat mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen, maka dibandingkan antara nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} serta membandingkan nilai signifikan t dengan *level of significant* (α). Nilai dari *level of significant* yang digunakan dalam

penelitian ini adalah 5 persen (0,05). Apabila sig t lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima. Demikian pula sebaliknya jika sig t lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak. Bila H_0 ditolak ini berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005:40). Hasil analisis uji t dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	9.348	3.471	2.693	.010
Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi	.310	.098	3.151	.003
1 Pemanfaatan Teknologi Informasi	-.063	.074	-.856	.396
Sistem pengendalian Internal	.230	.100	2.306	.026

Sumber : Pengolahan Data SPSS,2015

Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan SKPD

Untuk melihat pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap kinerja instansi pemerintah digunakan uji statistik t. Uji statistik t bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} serta melihat nilai signifikannya. Dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $\text{sig.t} < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Dan sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $\text{sig.t} > \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Dari Tabel 4.7 di atas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,306 > 2,013$ dan $\text{sig.t} (0,000) < 0,05$ dengan demikian H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Keterandalan Laporan Keuangan SKPD.

Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi Berpengaruh Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan SKPD

Untuk melihat pengaruh sumber daya manusia bidang akuntansi terhadap Keterandalan Laporan Keuangan SKPD digunakan uji statistik t. Uji statistik t bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} serta melihat nilai signifikannya.

Dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $\text{sig.t} < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dan sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $\text{sig.t} > \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Dari Tabel 4.7 di atas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,151 > 2,013$ dan $\text{sig.t} (0,000) < 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia bidang akuntansi berpengaruh terhadap Keterandalan Laporan Keuangan SKPD.

Pemanfaatan Teknologi Informasi Tidak Berpengaruh Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan SKPD

Untuk melihat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap Keterandalan Laporan Keuangan SKPD digunakan uji statistik t. Uji statistik t bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} serta melihat nilai signifikannya. Dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $sig.t < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dan sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $sig.t > \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Dari Tabel 4.7. di atas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0,856, < 2,013$ dan $sig.t (0,000) > 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap Keterandalan Laporan Keuangan SKPD.

Pembahasan Hipotesis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dibuktikan oleh penelitian Ruri Windiastuti (2013) dan Mirnayanti (2013) yang mengemukakan bahwa sistem pengendalian berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan.

Hasil ini menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal

di SKPD Kabupaten Agam berpengaruh dalam mencapai Keterandalan Laporan keuangan SKPD Kabupaten Agam.

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ruri Windiastuti (2013) dan I Gede Agus Yudianta bersama Ni Made Adi Erawati (2012) yang menyatakan kalau sumber daya manusia bidang akuntansi berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan. Namun hasil ini bertolak belakang dengan penelitian Mirnayanti (2013) yang menunjukkan bahwa sumber daya manusia bidang akuntansi tidak berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia bidang akuntansi di SPKD Kabupaten Agam berpengaruh dalam mencapai keterandalan laporan keuangan SKPD Kabupaten Agam

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak mempengaruhi keterandalan laporan keuangan SKPD Kabupaten Agam. Hasil ini sejalan dengan penelitian Mirnayanti (2013) Darwanis bersama Desi Dwi Mahyani (2009) yang meneliti teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan. Namun hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh I Gede Agus Yudianta bersama Ni Made Adi Erawati (2012) Darwanis bersama Desi Dwi Mahyani (2009) yang

menunjukkan bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan.

Dari keseluruhan integrasi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang sempurna sangat dipengaruhi oleh seberapa besar penerapan integrasi tersebut pada pemerintah daerah. Permasalahan yang terjadi dilapangan adalah kurangnya kesadaran oleh masing-masing individu untuk memanfaatkan teknologi informasi yang sudah ada semaksimal mungkin dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Pengendalian intern berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan SKPD di Kabupaten Agam.
2. Sumber daya manusia bidang akuntansi berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan SKPD di Kabupaten Agam.
3. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan SKPD di Kabupaten Agam.

Saran

Pada penelitian selanjutnya yang ingin meneliti dengan topik yang sama agar dapat menambahkan variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja instansi pemerintah, seperti variabel ketersediaan sarana dan prasarana, efektifitas, otoritas, disiplin dan lain sebagainya. Serta diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk memperbesar cakupan sampel yang diambil

DAFTAR PUSTAKA

- Darmayani, Made Ayu, Nyoman Trisna Herawati, Anantawikrama Tungga Atmaja. 2014. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Sipkd), Dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Laporan Keuangan Pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng, E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No: 1 Tahun 2014)
- Fikri, Miftahul. 2011. Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Instansi Pemerintah Kota Padang. Skripsi. UNP.
- Ghozali, I. 2006. Aplikasi Analisis Multivariat Program SPSS, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, Imam. 2007. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamzah, Ardi 2007, *Pengaruh Belanja dan Pendapatan terhadap pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan*

- Pengangguran*, Koferensi Penelitian, Jatim
- Hevesi, G. Alan. 2005. Standards for Internal Control in New York State Government. www.osc.state.ny.us
- Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan RI. 2005. *Kelemahan Desain dan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal*. www.itjen.depkeu.go.id.
- Mirnayanti. 2013. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* Vol 5 No.1 Juni 2014 ISSN 1858-3687 hal 69-80,
- Rahadi, Dedi Rianto. 2007. Peranan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Pelayanan di Sektor Publik. Disampaikan dalam Seminar Nasional Teknologi 2007 (SNT 2007), Yogyakarta, 24 November 2007: ISSN: 1978 – 9777.
- Sekaran, Uma. 2006. Metodologi Penelitian Bisnis. Salemba Empat Jakarta.
- Susilawati, Dwi Seftihani Riana. 2014. Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Antecedent Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Atar-Study And Accounting Research* Vol XI No. 1 – 2014 ISSN : 1693-4482
- Xu, et al. 2003. Faktor Kunci Dari Kualitas Informasi Akuntansi (studi kasus di Australia). *Jurnal Akuntansi*.
- Windiastruti, Ruri. 2013. Pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi Dan System Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung.
- Winidyaningrum, Celviana dan Rahmawati. 2010. Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris Di Pemda Subosukawonosraten), (Online), *Simposium Nasional Akuntansi XIII*, (http://blog.umy.ac.id/ervin/files/2012/05/ASP_18.pdf, diakses 28 Maret 2012).
- Wilkinson, W. Joseph, Michael J. Cerullo, Vasant Raval, dan Bernard Wong-On-Wing. 2000. *Accounting Informasi Systems: Essential Concepts and Application*. Fourth Edition. John Wiley and Sons. Inc.
- Yuliani, Syafrida. 2010. *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada*

Pemerintah Kota Banda Aceh). Jurnal telaah dan riset akuntansi Vol No 2 hal 206-220

Yudiantara, I Gede Agus. 2012. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi* Vol 5 No.1 Juni 2013 ISSN 1858-3687 hal 69-80,

http://www.bpk.go.id/web/files/2014/10/Buku_I,II_LK.pdf

<http://www.agamkab.go.id>

Peraturan Pemerintah, No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

____ Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah

____ Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

____ Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah

____ Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

____ Nomor 71 Tahun 2010 tentang laporan Keuangan daerah

____ Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia, *Undang-*

Undang Republik Indonesia, No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia